

---

## PENGGORGANISASIAN KURIKULUM (*Organizing Curriculum*)

Ahmad Hadziq<sup>1</sup>, Nurul Mubin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pasca Sarjana UNSIQ, Wonosobo, Indonesia ([hadziqslow@gmail.com](mailto:hadziqslow@gmail.com))

<sup>2</sup> Pasca Sarjana UNSIQ, Wonosobo, Indonesia ([mubin@unsiq.ac.id](mailto:mubin@unsiq.ac.id))

---

### Article Info

#### Article history:

Submission xx June 2025

Accepted xx June 2025

Published xx June 2025

#### Keywords:

Pengorganisasian Kurikulum;  
Model Kurikulum;  
Kurikulum Terintegrasi;  
Strategi Pembelajaran.

---

### ABSTRACT (10 PT)

Pengorganisasian kurikulum merupakan langkah strategis dalam merancang kurikulum untuk mencapai hasil belajar optimal. Artikel ini mengkaji pemikiran James Beane, Conrad F. Toepfer Jr., dan Samuel J. Alessi dalam Curriculum Planning and Development, serta membahas berbagai model seperti kurikulum berbasis mata pelajaran, terintegrasi, tematik, dan berbasis masalah. Ditekankan pentingnya kesinambungan antara tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Juga disoroti peran kolaboratif guru dan pemangku kepentingan dalam merancang kurikulum yang adaptif dan relevan.

---

**Corresponding Author:** Corresponding Author Name,  
Affiliation, Address, City and Postcode, Country  
Email: [xxxxxx@education.edu.my](mailto:xxxxxx@education.edu.my)

---

### Introduction

Kurikulum merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pendidikan tidak hanya bergantung pada isi kurikulum, tetapi juga pada bagaimana kurikulum tersebut dirancang dan diorganisasikan secara sistematis. Pengorganisasian kurikulum (*organizing curriculum*) menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan kurikulum karena menyangkut bagaimana isi pendidikan diatur, disusun, dan diimplementasikan agar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman.

Menurut S. Nasution, pengorganisasian kurikulum adalah upaya menyusun isi pendidikan ke dalam struktur yang logis dan pedagogis sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan secara efektif dan efisien. (Nasution, 2008) Dalam konteks pendidikan Indonesia, pengorganisasian kurikulum harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan global, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukmadinata yang menekankan pentingnya kesinambungan dan keterpaduan dalam penyusunan kurikulum agar mampu menjembatani antara tujuan pendidikan nasional dan praktik pembelajaran di kelas. (Sukmadinata, 2012)

Sementara itu, pemikiran dari Beane, Toepfer, dan Alessi dalam Curriculum Planning and Development menyatakan bahwa pengorganisasian kurikulum bukan hanya soal urutan materi, melainkan juga menyangkut pemilihan pendekatan yang sesuai, seperti pendekatan berbasis mata pelajaran, integratif, atau tematik, yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. (Beane, 1986)

Dengan demikian, pengorganisasian kurikulum menuntut keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perencana kurikulum, guru, kepala sekolah, hingga pembuat kebijakan. Kolaborasi ini diperlukan agar kurikulum yang dihasilkan tidak hanya terstruktur secara akademik, tetapi juga mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji prinsip dan model pengorganisasian kurikulum, baik secara teoritis maupun praktis, serta mengeksplorasi penerapan model tersebut dalam konteks pendidikan Indonesia. perubahan zaman.

### Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konsep, model, prinsip, tantangan, serta implikasi pengorganisasian kurikulum berdasarkan literatur dan sumber-sumber teoritis yang relevan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan kebijakan pendidikan, seperti karya S. Nasution (2008), Sukmadinata (2012), serta Beane, Toepfer, dan Alessi (1986) dalam

Curriculum Planning and Development. Selain itu, sumber dari praktisi pendidikan seperti Wina Sanjaya juga digunakan untuk memperkaya pemahaman praktis terhadap model dan penerapan pengorganisasian kurikulum di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan perspektif para ahli, serta menghubungkannya dengan konteks pendidikan di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada aspek konseptual dan aplikatif dari model-model pengorganisasian kurikulum serta tantangan implementasinya di lapangan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya pengorganisasian kurikulum secara sistematis dan kontekstual dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

### **Research Finding**

#### **Konsep Pengorganisasian Kurikulum**

Pengorganisasian kurikulum merupakan tahap penting dalam proses perencanaan kurikulum yang bertujuan untuk menyusun dan menyelaraskan berbagai komponen kurikulum secara sistematis. Hal ini mencakup pengaturan materi pelajaran, urutan penyajian, strategi pembelajaran, dan bentuk evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, pengorganisasian kurikulum adalah proses menyusun isi, pengalaman belajar, dan tujuan kurikulum agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. (Sukmadinata, 2012) Dengan kata lain, pengorganisasian kurikulum tidak hanya menyusun daftar isi pembelajaran, tetapi juga merancang kerangka logis yang mampu menghubungkan antara potensi siswa, tujuan pendidikan, dan realitas sosial.

Secara umum, pengorganisasian kurikulum dapat dibedakan ke dalam beberapa model, antara lain model subjek akademik (*subject-centered curriculum*), model terintegrasi (*integrated curriculum*), dan model berdasarkan pengalaman atau aktivitas (*experience-based curriculum*). (Wina Sanjaya, 2010) Masing-masing model memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus disesuaikan dengan konteks pendidikan, karakteristik peserta didik, dan kebijakan nasional yang berlaku.

#### **Model-Model Pengorganisasian Kurikulum**

##### **Model Berbasis Mata Pelajaran (Subject-Centered Curriculum)**

Model ini merupakan bentuk pengorganisasian kurikulum yang paling tradisional dan umum digunakan di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang berdiri sendiri, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Dalam model ini, penekanan utama berada pada penguasaan konten dan struktur ilmu pengetahuan. Kelebihannya terletak pada kedalaman materi dan kemudahan dalam evaluasi, namun kelemahannya adalah keterpisahan antar mata pelajaran sehingga kurang mencerminkan keterpaduan pengetahuan dalam kehidupan nyata. (Mulyasa, 2013)

##### **Model Kurikulum Terintegrasi (Integrated Curriculum)**

Model ini berupaya mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam tema atau topik tertentu sehingga peserta didik dapat memahami keterkaitan antar disiplin ilmu. Di Indonesia, pendekatan tematik integratif sudah mulai diterapkan secara luas di jenjang pendidikan dasar, khususnya dalam Kurikulum 2013. Kurikulum integratif dinilai lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa karena menyajikan pembelajaran secara holistik. (Kemendikbud, 2017) Menurut Wina Sanjaya, integrasi antarmata pelajaran memungkinkan siswa membangun pengetahuan yang utuh dan relevan dengan pengalaman mereka. (Sanjaya, 2010)

##### **3. Model Pengalaman (Experience-Based Curriculum)**

Model ini menekankan pada pengalaman langsung siswa dalam proses pembelajaran melalui proyek, simulasi, dan kegiatan kolaboratif. Kurikulum ini mengedepankan pendekatan konstruktivistik, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Model ini banyak diterapkan dalam pendidikan berbasis keterampilan dan vokasi, serta menjadi bagian penting dari pendekatan *student-centered learning*. (Suyanto, 2013)

#### **Prinsip Pengorganisasian Kurikulum**

Dalam mengorganisasi kurikulum, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan agar struktur kurikulum memiliki koherensi dan mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

Prinsip Kontinuitas, yaitu kesinambungan antar materi dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Kurikulum yang baik harus disusun berdasarkan perkembangan kognitif dan psikososial peserta didik. (Majid, 2014)

Prinsip Progresivitas, yakni penyusunan isi kurikulum dari yang sederhana ke yang kompleks, serta dari konkret ke abstrak, sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik.

Prinsip Integrasi, yaitu keterpaduan antara mata pelajaran, antara teori dan praktik, serta antara pembelajaran di sekolah dan kehidupan nyata. (Nasution, 2008)

Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam memilih dan menerapkan model pengorganisasian kurikulum agar pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif semata, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

#### **Tantangan Pengorganisasian Kurikulum di Indonesia**

Di Indonesia, tantangan pengorganisasian kurikulum sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi. Salah satunya adalah kesenjangan antara perencanaan kurikulum di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan. Guru sebagai pelaksana utama kurikulum sering kali mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kerangka kurikulum ke dalam rencana pembelajaran yang konkret. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pelatihan dan pendampingan terhadap guru dalam merancang pembelajaran tematik atau integratif. (Mulyasa, 2015)

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya kolaborasi antara perancang kurikulum, guru, dan pemangku kepentingan dalam menyusun kurikulum yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Beane et al., proses pengorganisasian kurikulum harus bersifat partisipatif dan demokratis, melibatkan semua elemen pendidikan agar hasilnya relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. (Beane, 1968)

Pengorganisasian kurikulum di Indonesia tidak hanya bersifat teknis dan teoritis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, budaya, serta kondisi geografis dan ekonomi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengorganisasian kurikulum di Indonesia adalah kesenjangan antara kebijakan kurikulum nasional dengan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Dalam banyak kasus, kurikulum dirancang secara sentralistik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lingkungan sosial budaya masing-masing daerah. (Suryosubroto, 2009)

Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah belum meratanya pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip dasar pengorganisasian kurikulum. Banyak guru yang masih berorientasi pada pendekatan konvensional dan berfokus pada penyampaian materi berdasarkan buku teks, tanpa mempertimbangkan integrasi antarmata pelajaran atau keterkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. (Suryana, 2015) Hal ini diperparah dengan rendahnya akses guru terhadap pelatihan profesional berkelanjutan, terutama di daerah terpencil. Padahal, guru seharusnya berperan aktif sebagai perancang kurikulum di tingkat mikro (kelas), yang menyesuaikan isi dan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa dan kondisi lokal. (Kunandar, 2011)

Tantangan berikutnya adalah perubahan kebijakan kurikulum yang sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Kurikulum 2013, hingga yang terbaru, Kurikulum Merdeka. Perubahan ini, meskipun dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan, sering kali membingungkan tenaga pendidik karena minimnya waktu dan sumber daya untuk adaptasi. Akibatnya, proses pengorganisasian kurikulum di sekolah menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. (Mulyasa, 2013)

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum masih tergolong rendah. Dalam praktiknya, banyak sekolah yang hanya mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat tanpa melakukan adaptasi terhadap konteks lokal. Padahal, dalam kerangka desentralisasi pendidikan, seharusnya terdapat ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum berdasarkan potensi lokal, kearifan budaya, dan kebutuhan peserta didik di wilayahnya. (Siregar, 2016)

Lebih jauh lagi, tantangan lain muncul dari era digital dan globalisasi yang menuntut pengorganisasian kurikulum menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Masuknya teknologi informasi dalam dunia pendidikan memerlukan perubahan paradigma dalam menyusun isi dan strategi kurikulum. Sayangnya, kurikulum yang terlalu padat dan berbasis konten masih banyak ditemui di sekolah, sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan literasi digital. (Daryanto dan Karim, 2017)

#### **Implikasi Terhadap Praktik Pendidikan**

Pengorganisasian kurikulum yang tepat berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Kurikulum yang terstruktur secara logis dan integratif akan memudahkan guru dalam menyusun perangkat ajar dan strategi pembelajaran yang sesuai. Sebaliknya, kurikulum yang disusun secara fragmentaris dan tidak kontekstual akan menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh

karena itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan nasional, pengembangan profesional guru, dan keterlibatan komunitas sekolah dalam pengorganisasian kurikulum yang adaptif dan responsif.

Pengorganisasian kurikulum yang dilakukan secara tepat dan berbasis pada prinsip-prinsip pedagogis yang kuat akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik pembelajaran di ruang kelas. Dalam konteks pendidikan Indonesia, praktik pengajaran di kelas sering kali menjadi cerminan langsung dari bagaimana kurikulum diorganisasi. Oleh karena itu, kualitas struktur kurikulum secara langsung memengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar.

Implikasi pertama yang paling nyata adalah pada perencanaan pembelajaran. Guru yang memahami pengorganisasian kurikulum akan mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar secara komprehensif dan kontekstual. Ia akan mampu memetakan kompetensi dasar, memilih materi yang sesuai, merancang aktivitas pembelajaran yang bermakna, serta menentukan metode evaluasi yang relevan. Guru juga dapat mengembangkan pembelajaran lintas mata pelajaran (*cross-disciplinary learning*), sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih integratif dan aplikatif. (Majid, 2014)

Implikasi kedua adalah pada strategi pengajaran yang digunakan di kelas. Pengorganisasian kurikulum yang menyatu dan integratif akan mendorong guru untuk tidak hanya mengandalkan ceramah, tetapi juga menerapkan pendekatan yang lebih aktif dan partisipatif seperti diskusi, proyek kolaboratif, pemecahan masalah, dan simulasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *student-centered learning* yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, misalnya, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bentuk nyata dari strategi pembelajaran berbasis kurikulum yang terorganisasi dengan baik. (Kemendikbudres, 2022)

Implikasi berikutnya adalah pada pencapaian hasil belajar siswa. Kurikulum yang terorganisasi secara sistematis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik akan mempermudah mereka dalam memahami keterkaitan antar konsep serta relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini akan meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kejenuhan. Sebaliknya, kurikulum yang disusun secara terfragmentasi cenderung menciptakan beban belajar yang berat dan membuat siswa kesulitan dalam memaknai proses pembelajaran itu sendiri. (Sudjana, 2009)

Tak kalah penting adalah implikasi terhadap penguatan peran guru sebagai desainer pembelajaran. Guru yang terlibat aktif dalam pengorganisasian kurikulum tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga sebagai inovator pendidikan. Ia akan mampu menyesuaikan isi kurikulum dengan latar belakang budaya siswa, lingkungan sekolah, serta dinamika sosial di sekitarnya. Dengan demikian, guru bukan sekadar "pengikut kurikulum", tetapi menjadi mitra aktif dalam pengembangan kurikulum yang adaptif. (Zuchdi, 2009)

### **Strategi Penguatan Pengorganisasian Kurikulum di Sekolah**

Menghadapi tantangan dan tuntutan di atas, diperlukan strategi penguatan dalam pengorganisasian kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Strategi ini harus bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis pada penguatan kapasitas guru serta kepemimpinan sekolah.

#### **Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan Berkelanjutan**

Strategi pertama dan paling mendasar adalah penguatan kapasitas guru dalam hal perencanaan dan pengorganisasian kurikulum. Pelatihan tidak boleh bersifat sesaat (*insidental*), tetapi harus terstruktur dan berkelanjutan melalui program *in-service training*, *workshop*, dan *lesson study*. Materi pelatihan harus mencakup pemahaman tentang model-model organisasi kurikulum, integrasi lintas disiplin, pendekatan pembelajaran diferensiatif, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. (Widodo, 2017)

#### **Penguatan Kepemimpinan Kurikulum di Sekolah**

Kepala sekolah dan tim kurikulum harus berperan aktif sebagai fasilitator dan pengarah dalam proses pengorganisasian kurikulum. Mereka perlu menciptakan iklim sekolah yang mendukung inovasi kurikulum serta menyediakan ruang kolaboratif bagi guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan sesuai konteks. Implementasi komunitas belajar guru (*learning community*) merupakan salah satu strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas organisasi kurikulum. (Senge, 2014)

#### **Partisipasi Komunitas Sekolah dan Dunia Usaha/Industri**

Dalam kerangka *link and match*, sekolah perlu melibatkan masyarakat sekitar serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam merancang kurikulum kontekstual. Hal ini sangat relevan terutama untuk SMK dan pendidikan vokasi. Pengorganisasian kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dunia kerja serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata secara kompeten. (Dirjen Vokasi Kemendikbud, 2021)

#### **Pemanfaatan Teknologi dalam Desain Kurikulum**

Digitalisasi kurikulum dan penggunaan Learning Management System (LMS) dapat mempermudah guru dalam menyusun, menyimpan, dan mengembangkan bahan ajar. Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk berbagi praktik baik antar sekolah maupun antar daerah, sehingga memperluas cakupan inovasi pengorganisasian kurikulum. (Arifin, 2020)

### Conclusion

Pengorganisasian kurikulum adalah proses penting dalam perencanaan pendidikan yang mencakup pemilihan isi dan penyusunan struktur pembelajaran yang logis, koheren, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Pengorganisasian ini mencerminkan filosofi pendidikan suatu bangsa, karena dari sanalah tujuan pendidikan dijabarkan ke dalam praktik pembelajaran. Di Indonesia, kompleksitas pengorganisasian kurikulum dipengaruhi oleh keragaman sosial-budaya dan dinamika kebijakan nasional. Ketidaksesuaian antara perencanaan di tingkat pusat dan implementasi di tingkat sekolah sering menimbulkan kesenjangan kualitas pembelajaran. Kurikulum yang tidak mempertimbangkan prinsip integrasi, kesinambungan, dan urutan sistematis cenderung menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru, rendahnya pelatihan kurikulum, serta minimnya dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, reformasi kurikulum menuntut kolaborasi semua pihak dan penguatan profesionalisme pendidik agar kurikulum benar-benar responsif terhadap konteks lokal serta mampu menjawab tantangan global.

### Bibliography

- Arifin, Z. (2020). "Pengembangan Kurikulum Digital," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(2), 134–146.
- Beane, J. Toepfer, C.F. Jr., & Alessi, S.J. (1986). *Curriculum Planning and Development*. Boston: Allyn and Bacon.
- Daryanto & Karim, S. (2017). *Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dirjen Vokasi Kemendikbud. (2021). *Strategi Link and Match 8+i*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Implementasi Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majid, A. (2014). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2015). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2008). *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2008). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, Wina. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Senge, P.M. (2014). *Schools that Learn (Sekolah yang Belajar)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siregar, E. (2016). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudjana, N. (2009). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N.S. (2012). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryana, D. (2015). "Analisis Implementasi Kurikulum 2013 oleh Guru Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 45–55.
- Suryosubroto, B. (2009). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto & Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, H. P. (2017). "Continuing Professional Development in Indonesia: A Review," *TEFLIN Journal*,

28(1), 1-14.

Zuchdi, D. (2009). *Humanisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.